**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN USIA SEKOLAH DASAR DI KOTA MAKASSAR**

**Amrullah Mahmud\*)**

***Abstract:*** *This research as a porpose (i) to know illustration and establishment expanding education access for street childreen of elementary school in makassar (ii) Knowing what obscacles pased by institute providers of education access for street chidreen of elementary school in makassar. The research methads used in this research is qualitative descriptive. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. The subject is the institute/foundation in particular education of street childreen with social departement in makassar as a center of information about street childreen. The resuls of illustration that indicate education of street children of elementary shool in makassar still having some obstacles such as, lact of socialization to society about the importance of education especially low-income society, lack of facilities and infrastructure owned by non formal education in teaching and learning process, there is no legal basis (UU) which regulates the sanctions agains children which is located on the roadside, there is no UU governing the imposition of sanctions to parents who employ children which is still elementary school (SD) Handling Makassar street children still do not have model yet and the appropriate approach in haldling multi-system base. Handling has been largely ineffective. Seen by parenting tend to be unproductive. Estabilish efforts which is conducted social departement of makassar is quite good passable and institutions associated with street chidren because the existence street children shelter of elementary school (SD). Prepared by non formal institutions such as an-nur foundation and save street child Makassar community. The teachers involved in the institution already has qualified strata 1 and school affered by these chidren are all borne by the institution (free), so it can be concluded that the expanding education access of street children of elementary school is not yet maximal, because there are still have abstacles at the stages of planning, and lack of socialization as well as lack of facilities.*

***Key words****: expanding the education acces, street children of elementary school.*

Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional menurut undang-undang pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Penulis memandang bahwa alokasi dana APBN yang sangat besar juga ternyata belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak atas pendidikan terutama bagi fakir miskin dan anak terlantar. Hidup mereka ternyata belum dijamin oleh negara secara mutlak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.* Sebab jangankan untuk mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang layak, untuk mendapat hak atas pendidikan yang telah diatur dalam DUHAM PBB sekalipun mereka tidak mampu.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan Negara maju, Negara berkembang atau bahkan Negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara cuma-cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin.

Berdasarkan observasi dilapangan yang saya lakukan di Kota Makassar bahwa banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada dibangku sekolahan, justru hidup dijalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet, merupakan agenda rutin yang harus mereka lalui untuk mengisi hari-harinya. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah tentang tanggung jawab sosial akan pendidikan terutama untuk anak jalanan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari dana APBN untuk dunia pendidikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, menurut perda No 2 Tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar telah melakukan beberapa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar. selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun perda tersebut menjelaskan mengenai (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial. Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini namun tidak semua anak-anak di negeri ini beruntung memperoleh kesempatan untuk belajar di lingkungan sekolah yang diimpikan sebagian besar anak jalanan. Jika hal tersebut belum juga mampu dilakukan oleh pemerintah, maka satu hal yang naif ternyata telah terjadi di negara ini karena eksistensi dunia pendidikan yang keberadaanya telah dijamin oleh negara dan menjadi hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih kerdil dalam implementasi nyata.

Di Asia, menurut Childhope Asia, sebuah NGO yang berbasis di Philipina, memperkirakan ada sekitar 25-30 juta anak jalan*.* Di Indonesia, berdasarkan hasil analisis situasi mengenai anak jalanan yang dilakukan oleh Departemen Sosial menunjukkan 230.000 pada tahun 2009 anak jalanan (Sutriyanto , 2011*).* Berdasarkan data jumlah anak jalanan dari Dinas Sosial Kota Makassar Jumlah anak jalanan setiap tahunnya terus meningkat, tahun 2010 sebanyak 870 anak, 2011 sebanyak 901 anak, 2012 ada 918 anak, 990 anak pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1043 anak.

Di Kota Makassar keberadaan anak jalanan dapat terlihat di tempat-tempat umum seperti di persimpangan jalan tol reformasi, sekitaran anjungan Pantai Losari, Jalan Andi Pangerang Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, sekitaran Mall Panakkukang dan Mall Ratu Indah, Di terminal, tempat pembuangan sampah dan berkeliaran di kantor kantor pemerintah dan swasta. Sebagian besar anak jalanan di Kota Makassar merupakan pendatang dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar. Anak jalanan ini adalah anak-anak dari para pendatang yang mencoba mencari penghidupan lebih baik di Kota Makassar.

Pendidikan yang dapat membantu terjadinya perubahan perilaku anak-jalanan dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Bisa dengan membangun sekolah gratis, Kelas belajar Jalanan, pendirian rumah singgah, maupun donasi untuk menunjang kegiatan belajar anak jalanan seperti yang dilakukan oleh pengelola lembaga anak jalanan kota Makassar. Namun, apapun bentuknya pendidikan adalah hak bagi semua warga negara tidak tertinggal anak jalanan.

Berdasarkan fakta dan opini di atas maka maka penulis merasa perlu dan penting untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai “Perluasan Akses Pendidikan Bagi Anak Jalanan Usia Sekolah Dasar Di Kota Makassar”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran dan bentuk usaha perluasan akses pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar di kota Makassar? (2) Kendala apa yang dihadapi oleh lembaga penyedia akses pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar di Kota Makassar?

Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui gambaran dan bentuk usaha perluasan akses pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh lembaga penyedia akses pendidikan bagi anak jalanan usia Sekolah dasar di Kota Makassar.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.

Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkunganya.  Umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Anak usia sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun, memiliki fisik lebih kuat mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung dengan orang tua.

**METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Yang bertujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perluasan akses pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar di kota Makassar, maka data hasil penelitian bersifat deskriptif, yang dinarasikan dalam bentuk kata-kata atau uraian tertulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Yayasan Pendidikan An-Nur, Head of All Division Komunitas Save Street Child Makassar, dan Pekerja Sosial Madya Dinas Sosial Kota Makassar, yang aktif pada tahun ajaran 2015/2016, dan berada di wilayah Kota Makassar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pada saat perencanaan yang dilakukan oleh lembaga dan steck holder. Menelaah setiap tahapan perencanaan, seperti proses belajar, kondisi tempat berlangsungnya proses pengajaran, dan keadaan anak jalanan usia Sekolah Dasar pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran perluasan akses Pendidikan bagi anak jalanan usia Sekolah Dasar dan mengumpulkan data mengenai aktifitas anak jalanan dan lembaga yang memberikan akses pendidikan anak jalanan usia sekolah dasar. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi data tentang gambaran bentuk usaha akses perluasan pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar dan untuk mendapatkan informasi data dari pengelola lembaga dan steck holder tentang hal-hal yang terkait dengan akses pendidikan anak jalanan usia sekolah dasar di kota Makassar.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Perluasan dan bentuk usaha Akses Pendidikan Bagi Anak Jalanan Usia Sekolah Dasar Di Kota Makassar**

Penanganan anak jalanan Kota Makassar masih belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dalam penanganan yang *multi sistem base*. Penanganan selama ini cenderung tidak efektif, terlihat dari pola asuh yang cenderung tidak produktif. Kondisi ini tampaknya perlu menjadi perhatian kontrol sosial yang serius bagi pemerintah, pemerhati, dan masyarakat terutama layanan pendidikan. Beberapa lembaga penyedia layanan pendidikan bagi anak jalanan usia sekolah dasar di Kota Makassar turut memberikan respons positif adalah Yayasan pendidkan An-Nur, dan Lembaga komunitas *Save Street Child* Makassar.

Peneliti memilih lembaga Yayasan Pendidikan An-Nur ini berdasarkan indikator berikut :

1. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang telah mendapat rekomendasi langsung dari dinas sosial kota Makassar.
2. Lembaga ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai utuk menampung anak jalanan.
3. Lembaga An-Nur ini merupakan lembaga yang di naungi lebih dari 50 anak jalanan.
4. Lembaga ini memiliki tenaga pengajar tetap.
5. Lembaga ini mengunakan kurikulum sesuai standar nasional.
6. Lembaga ini membebaskan biaya pendidikan bagi anak jalanan.
7. Lembaga ini merupakan lembaga resmi yang terdaftar dilingkup pemerintahan.

Peneliti memilih lembaga Save Street Child Makassar berdasarkan indikator berikut :

1. Lembaga ini merupakan lembaga yang telah mendapat rekomendasi langsung dari dinas sosial kota Makassar.
2. Lembaga ini merupakan lembaga yang terjun langsung ke jalanan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berada dijalan.
3. Lembaga ini memiliki kurikulum yang mengutamakan pendidikan ahlak dan kretifitas bagi anak jalanan.
4. Lembaga ini bersifat independent tanpa bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta.
5. Memiliki pengajar dari berbagai profesi berbeda.
6. Lembaga ini memiliki lebih dari 50 anak jalanan.

Bentuk pelayanan yang diberikan dari lembaga An-Nur adalah :

1. Pelayanan dalam pembelajaran yaitu pemberian sistem pembelajaran dengan berlandaskan kurikulum.
2. Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana yaitu kelas, meja, bangku dan buku untuk belajar.
3. Pelayanan konseling yaitu pelayanan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan, dan memecahkan masalah.
4. Pelayanan bimbingan mental yaitu pelayanan bimbingan keagamaan.
5. Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan bimbingan keterampilan kerja seperti kerajinan tangan.

Bentuk pelayanan yang diberikan dari lembaga Save Street Child Makassar adalah :

1. Pelayanan dalam pembelajaran yaitu pemberian sistem pembelajaran dengan berlandaskan kurikulum yang dibuat sendiri oleh lembaga.
2. Pelayanan dalam hal penunjang pembelajaran yaitu pemberian alat tulis.
3. Pelayanan konseling yaitu pelayanan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan, dan memecahkan masalah.
4. Pelayanan bimbingan mental yaitu pelayanan bimbingan keagamaan.
5. Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan bimbingan keterampilan kerja seperti kerajinan tangan.
6. Pelayanan kesehatan yaitu pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut, sunat massal dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan kebutuhan pangan yaitu pelayanan pemberian makan dan minum.
8. Pelayanan penggenalan alam dalam hal ini anak tersebut secara langsung diajak melihat alam dengan berrekresi sekali sebulan.

Dinas Sosial Kota Makassar senantiasa mengemukakan bahwa jumlah Anak Jalanan yang membutuhkan pelayanan semakin meningkat, sementara itu kemampuan institusi pelayanan sosial yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Kemasyarakatan (LSK) atau LSM dan lembaga-lembaga keagamaan  sangat terbatas.

Dalam usaha untuk menanggulangi jumlah anak jalanan Dinas Sosial melakukan pembinaan, kegiatan belajar mengajar, pelatihan keterampilan dan penyuluhan bagi anak jalanan.

1. **Kendala yang dihadapi lembaga pendidikan anak jalanan usia sekolah dasar di Kota Makassar**

Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan maupun program penanganan anak jalanan, satu hal yang penting untuk selalu disampaikan adalah penyuluhan mengenai hak-hak anak dan upaya mengembalikan anak kembali ke rumahnya agar mereka dapat hidup dan tumbuh kembang secara wajar.  Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program sangat dibutuhkan karena tanpa dukungan masyarakat maka program-program tersebut tidak akan memberikan hasil.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan antara lain : 1) Tidak memberikan sedekah kepada pengemis anak atau membeli barang/jasa dari anak jalanan, 2) memahami bahwa perbuatan amal dengan memberikan bantuan (uang) kepada anak-anak yang bekerja di jalanan tidak mempunyai daya ungkit terhadap status ekonomi dan sosial kehidupan mereka, 3) menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, transparan dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya dan 4) memberikan dukungan dengan pola anak asuh.

Pada dasarnya pemberian akses pendidikan bagi anak jalanan ini bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penolakan dari orang tua anak tersebut untuk memperoleh pendidikan. Mereka lebih cenderung menyuruh anak mereka untuk bekerja dijalanan.
2. Kesulitan untuk mengajak anak tersebut untuk bersekolah sebab mereka sudah terbiasa main dijalan.
3. Kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran bagi anak jalanan.
4. Kurangnya bantuan dari pemeritah khususnya terkait masalah dana.
5. Sulitnya mengubah sikap anak jalanan tersebut yang sudah terbiasa bersikap kasar dijalanan.
6. Proses pembelajaran yang kurang kondusif sebab lingkup belajar dijalanan yang terlalu ribut.
7. Terdapat jaringan eksploitasi anak sehingga lembaga kesulitan untuk memberikan pendidikan terhadap anak jalanan.
8. Sulit terjalin komunikasi yang baik dengan mereka sebab mereka yang sudah terbiasa hidup dijalanan.
9. Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini misalkan masalah bantuan dana dan perijinan.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dilain sisi walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit.

Karena pendidikan dianggap penting untuk semua kalangan maka setiap lapisan masyarakat berhak memperoleh pendidikan tersebut termasuk anak jalanan.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah anak jalanan usia sekolah dasar mereka diharuskan bersekolah mulai tingkat sd kelas satu sampai kelas enam. Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya, yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkunganya.  Umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Kondisi kemiskinan sangat mempengaruhi pertumbuhan (kehidupan) anak, dan karenanya sewaktu-waktu hak anak bisa terlanggar. Kejahatan *trafficking* bisa saja menimpa anak jalanan, karena mereka hidup jauh dari lingkungan keluarganya dari orang dewasa / orang tuanya yang seharusnya melindungi dia. Di dalam situasi kekerasan yang dihadapi secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, maka pelajaran itulah yang melekat dalam diri anak jalanan dan membentuk kepribadian mereka.

Upaya untuk mengatasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu: pendekatan penghapusan (*abolition*), pendekatan perlindungan (*protection*), pendekatan pemberdayaan (*empowerment*). Selain itu pembatasan urbanisasi juga perlu dilakukan agar tidak ada orang tua yang menganggur yang menyebabkan anaknya menjadi putus sekolah dan beralih menjadi anak jalanan. Mengadakan program yang memberikan pendidikan gratis untuk anak putus sekolah terutama anak jalanan agar tetap dapat mengenyam pendidikan sebagai bekal untuk masa depan mereka sendiri, selain itu memberikan rumah singgah juga dapat membuat mereka merasa terlindungi dan diperhatikan oleh orang lain dari berbagai pihak. Rumah singgah yang dimaksudan adalah berbagai lembaga yang dapat menampung anak jalanan khususnya usia sekolah dasar tersebut seperti yayasan pendidikan An-Nur, Lembaga Komunitas Save Street Child Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar. Beberapa lembaga tersebutlah yang dapat membantu anak jalanan tersebut khususnya usia sekolah dasar. Lembaga ini membantu mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

Gambaran pendidikan anak jalan usia sekolah dasar (SD) di Kota Makassar masih mengalami beberapa kendala seperti, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan khusunya masyarakat ekonomi rendah, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan non formal dalam proses belajar mengajar, tidak ada dasar hukum (UU) yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap anak-anak yang berada dipinggiran jalan seperti (ngamen, minta-minta, parkir liar, menjual koran/ tissu, dan pak ogah), tidak ada UU yang diberikan kepada orang tua yang memengerjakan anak-anak yang masih usia sekolah dasar (SD). Bentuk usaha yang dilakukan dinas sosial Kota Makassar dan lembaga-lembaga yang terkait dengan anak jalanan tergolong cukup baik, karena adanya tempat penampungan anak jalanan usia sekolah dasar (SD) yang disiapkan oleh lembaga-lembaga non formal seperti yayasan An-nur. Serta guru yang terlibat dalam lembaga tersebut sudah memiliki kualifikasi strata 1 dan sekolah yang di tawarkan oleh anak-anak tersebut di tanggung semua oleh lembaga (Gratis).

Kendala yang dihadapi lembaga pendidikan anak jalanan usia sekolah dasar di kota Makassar adalah Adanya penolakan dari orang tua anak tersebut untuk memperoleh pendidikan. Mereka lebih cenderung menyuruh anak mereka untuk bekerja dijalanan. Kesulitan untuk mengajak anak tersebut untuk bersekolah sebab mereka sudah terbiasa main dijalan. Kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran bagi anak jalanan. Kurangnya bantuan dari pemeritah khususnya terkait masalah dana. Sulitnya mengubah sikap anak jalanan tersebut yang sudah terbiasa bersikap kasar dijalanan. Proses pembelajaran yang kurang kondusif sebab lingkup belajar dijalanan yang terlalu ribut. Terdapat jaringan eksploitasi anak sehingga lembaga kesulitan untuk memberikan pendidikan terhadap anak jalanan. Sulit terjalin komunikasi yang baik dengan mereka sebab mereka yang sudah terbiasa hidup dijalanan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini misalkan masalah bantuan dana dan perijinan.

**DAFTAR RUJUKAN**

Drs. Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Rosdalina. 2007. *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan.*

*Undang-undang* RI Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Cemerlang.

*Undang-Undang* RI No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

Depsos RI. 1999. *Klasifikasi dan Ciri Anak Jalanan.* Online. (<http://www.indomedia.com>). Diakses tanggal 17 Juni2015.

Joni. 1999. “ *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.”* Online ([http://www.Citraaditya.com/phd.id. Diakses 4 April 2015](http://www.Citraaditya.com/phd.id.%20Diakses%204%20April%202015).

**JURNAL EKLEKTIKA**

**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK**

**JALANAN USIA SEKOLAH DASAR**

**DI KOTA MAKASSAR**

**AMRULLAH MAHMUD**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2016**